

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Digital TV (DTV) merupakan masa depan TV dengan kapabilitas yang jauh melampaui kemampuan TV masa kini. Dengan jumlah *pixel* yang tinggi maka kualitas gambar DTV amat baik. Teknologi DTV juga didukung dengan perkembangan kompresi video sehingga penggunaan lebar pita (*bandwidth*) menjadi lebih efisien. Kemampuan lain DTV adalah signal DTV dapat disebarluaskan melalui jaringan Internet. Dengan menggunakan jaringan *Internet Protocol (IP)*, layanan DTV dapat ditingkatkan dengan menyediakan layanan interaktif.

Melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengarah kepada jaringan yang berbasis IP dan pita lebar maka layanan DTV tersebut sangat dimungkinkan melalui jaringan IP yang disebut dengan layanan *Internet Protocol Television (IPTV)*. Layanan IPTV ini merupakan konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan penyiaran (*broadcast*). Selain perkembangan TIK, konvergensi jaringan juga didorong oleh kebutuhan pengguna yang semakin membutuhkan layanan telekomunikasi yang bervariasi. Pengguna tidak cukup dengan layanan suara saja tetapi juga data dan video.

Dengan adanya jaringan pita lebar berbasis-IP yang mampu mengirim konten video dengan kualitas minimal *Standard definition TV (SDTV)* maka kebutuhan pengguna akan layanan penyiaran bisa dilewatkan melalui jaringan telekomunikasi berbasis IP. Kebutuhan masyarakat akan layanan yang semakin beragam dan interaktif, seperti *Video on Demand (VoD)*, *Gaming on Demand (GoD)*, *TV Telephony* dan lainnya juga dapat dimungkinkan.

Selain kesiapan jaringan pita-lebar untuk mendukung terselenggaranya layanan IPTV, faktor lain yang juga sangat menentukan adalah adanya regulasi yang mampu menciptakan iklim sehat bagi berkembangannya bisnis IPTV di Indonesia. Regulasi yang ada dirasakan banyak kalangan belum mampu mengakomodir perkembangan bisnis IPTV dan menjadi kendala tersendiri khususnya bagi para penanam-modal yang menginginkan adanya kepastian dalam regulasi.

Oleh karena itu diperlukan adanya kajian terhadap peraturan dan perundangan yang ada, melakukan studi perbandingan regulasi negara lain, melakukan survei terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan IPTV (yaitu para operator telekomunikasi/penyiaran, regulator, penyelenggara layanan dan penyedia konten) untuk akhirnya memberikan **usulan** mengenai regulasi yang cocok diterapkan di Indonesia.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Perkembangan IPTV di Indonesia dirasakan terhambat karena belum adanya regulasi mengenai penyelenggaraan IPTV. Regulasi Penyiaran dan Telekomunikasi yang terpisah juga membuat dilema tersendiri bagi perkembangan IPTV di Indonesia.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan usulan tentang regulasi yang cocok untuk mendukung terselenggaranya layanan IPTV di Indonesia secara sehat dengan melakukan kajian terhadap regulasi yang ada, studi terhadap regulasi serupa di negara-negara lain, dan survei terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan IPTV.

1.4 BATASAN MASALAH

Ruang lingkup dan batasan masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Fokus penelitian adalah pada lisensi, sedangkan masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan regulasi hanya sebagai pelengkap saja.
- b. *Benchmark* regulasi dilakukan pada sembilan (9) negara di Asia, namun pembahasan secara terperinci hanya untuk Negara Korea Selatan, sedangkan kedelapan negara lainnya akan diambil hal-hal yang penting saja dan disajikan dalam bentuk tabel.
- c. Kebutuhan (*demand*) masyarakat terhadap IPTV tidak menjadi bahan kajian, informasi tentang hal tersebut hanya merupakan data sekunder yang didapatkan dari peneliti lain..

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah :

1.5.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori tentang IPTV, dan sekilas tinjauan secara singkat dari segi teknis dan bisnisnya. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari peraturan-perundangan yang sudah ada, yang berkaitan dengan penyelenggaraan IPTV dan aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Studi literatur juga dilakukan terhadap pengalaman negara-negara lain dalam implementasi IPTV, terutama yang berkaitan dengan regulasi. Penulis juga mempelajari kondisi di Indonesia sekarang, yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan IPTV. Dan yang terakhir penulis juga mempelajari dengan cermat, rancangan usulan regulasi IPTV yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan diperkirakan akan diresmikan pada akhir Juni 2009.

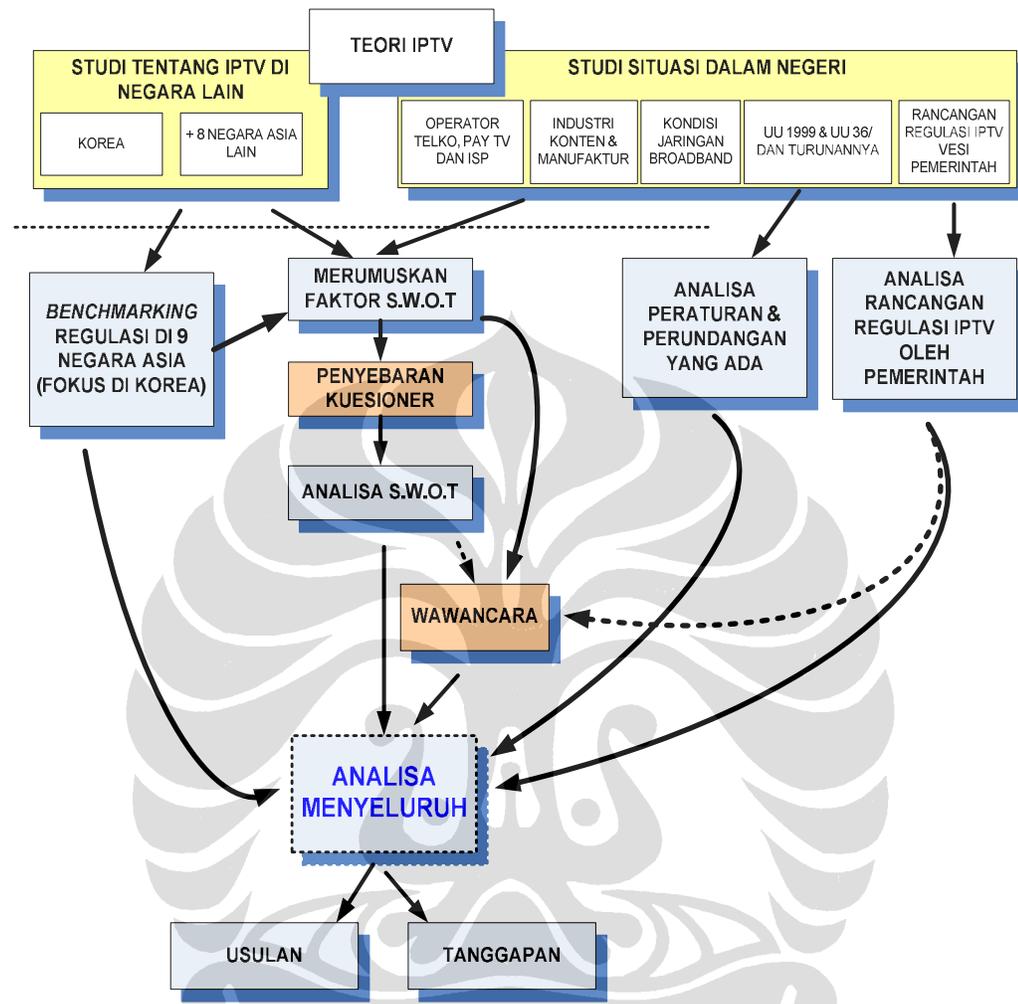
1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan survey melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai macam referensi dan hasil penelitian peneliti lain.

1.5.3 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan pada tahap pertama, selain dengan melakukan *benchmarking* terhadap regulasi di negara-negara lain, juga dengan melakukan analisa **kuantitatif** terhadap hasil survey. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa SWOT. Dengan analisa ini dapat disimpulkan strategi apa yang seharusnya dilakukan dalam implementasi layanan IPTV di Indonesia. Sedangkan pada tahap kedua dilakukan secara **kualitatif**. Dengan teknik ini didapatkan kategori-kategori yang sering muncul dan menjadi perhatian dan dapat dijadikan butir-butir usulan regulasi. Penulis juga melakukan analisa terhadap Peraturan-perundangan yang ada untuk mengetahui pada bagian mana dari Peraturan-perundangan tersebut yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan layanan IPTV di Indonesia.

1.6 KERANGKA PENELITIAN



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Kajian ini berangkat dengan landasan teori mengenai IPTV, kajian dilakukan mulai dari definisi, kemudian mengarah pada segi teknis dan bisnisnya. Dilanjutkan dengan kajian mengenai kondisi eksisting di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi layanan IPTV, yaitu :

- Industri telekomunikasi dan jaringan yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi baik jaringan tulang-punggung dan jaringan aksesnya
- Industri televisi berbayar dan perkembangannya
- Industri konten dan manufaktur

- Minat masyarakat terhadap layanan IPTV yang diambil dari hasil penelitian peneliti lain..

Langkah berikutnya adalah kajian terhadap penyelenggaraan layanan IPTV di sembilan (9) negara Asia. Negara-negara tersebut adalah Korea Selatan, Hongkong, Jepang, Thailand, Singapore, China, Malaysia, India dan Taiwan. Namun kajian secara mendalam hanya kepada satu negara yaitu Korea Selatan.

Dari analisa terhadap kondisi yang ada baik kondisi di dalam negeri dan di luar negeri, penulis menyusun faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi terselenggaranya layanan IPTV di Indonesia.

Untuk mengetahui strategi apa yang seharusnya dilakukan dalam implementasi layanan IPTV, penulis melakukan survey kepada masyarakat yang bekerja pada sektor telekomunikasi dan penyiaran, yaitu penyelenggara telekomunikasi, lembaga penyiaran, badan regulator dan pemerintah. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar keempat faktor-faktor tersebut. Hasil survey dianalisa menggunakan analisa SWOT.

Selanjutnya dilakukan kajian terhadap Undang-undang yang ada, terutama UU (Undang-undang) Telekomunikasi dan UU Penyiaran, untuk mengetahui pasal-pasal mana dari kedua UU tersebut yang mendukung dan yang tidak mendukung terselenggaranya layanan IPTV di Indonesia. Kajian juga dilakukan terhadap rancangan regulasi IPTV yang diusulkan pemerintah (juni 2009) untuk mengetahui sejauh-mana rancangan itu dapat diimplementasikan dan dampak baik-buruknya.

Untuk memperkuat analisa, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang kompeten dalam penyelenggaraan layanan IPTV, yaitu yang berasal dari regulator (BRTI, KPI), pemerintah dan juga dari operator.

Dan langkah terakhir adalah melakukan analisa secara keseluruhan, untuk merumuskan beberapa alternatif model lisensi dan regulasi yang cocok diterapkan di Indonesia, juga tanggapan terhadap rancangan regulasi IPTV yang telah diusulkan oleh pemerintah baru-baru ini. .

Oleh karena itu diperlukan adanya kajian terhadap peraturan dan perundangan yang ada, melakukan studi perbandingan regulasi negara lain, melakukan survei terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan IPTV (yaitu para operator telekomunikasi/penyiaran, regulator, penyelenggara layanan dan penyedia konten) untuk akhirnya memberikan **usulan** mengenai regulasi yang cocok diterapkan di Indonesia.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Perkembangan IPTV di Indonesia dirasakan terhambat karena belum adanya regulasi mengenai penyelenggaraan IPTV. Regulasi Penyiaran dan Telekomunikasi yang terpisah juga membuat dilema tersendiri bagi perkembangan IPTV di Indonesia.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan usulan tentang regulasi yang cocok untuk mendukung terselenggaranya layanan IPTV di Indonesia secara sehat dengan melakukan kajian terhadap regulasi yang ada, studi terhadap regulasi serupa di negara-negara lain, dan survei terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan IPTV.

1.4 BATASAN MASALAH

Ruang lingkup dan batasan masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Fokus penelitian adalah pada lisensi, sedangkan masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan regulasi hanya sebagai pelengkap saja.
- b. *Benchmark* regulasi dilakukan pada sembilan (9) negara di Asia, namun pembahasan secara terperinci hanya untuk Negara Korea Selatan, sedangkan kedelapan negara lainnya akan diambil hal-hal yang penting saja dan disajikan dalam bentuk tabel.
- c. Kebutuhan (*demand*) masyarakat terhadap IPTV tidak menjadi bahan kajian, informasi tentang hal tersebut hanya merupakan data sekunder yang didapatkan dari peneliti lain..

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah :

1.5.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori tentang IPTV, dan sekilas tinjauan secara singkat dari segi teknis dan bisnisnya. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari peraturan-perundangan yang sudah ada, yang berkaitan dengan penyelenggaraan IPTV dan aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Studi literatur juga dilakukan terhadap pengalaman negara-negara lain dalam implementasi IPTV, terutama yang berkaitan dengan regulasi. Penulis juga mempelajari kondisi di Indonesia sekarang, yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan IPTV. Dan yang terakhir penulis juga mempelajari dengan cermat, rancangan usulan regulasi IPTV yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan diperkirakan akan diresmikan pada akhir Juni 2009.

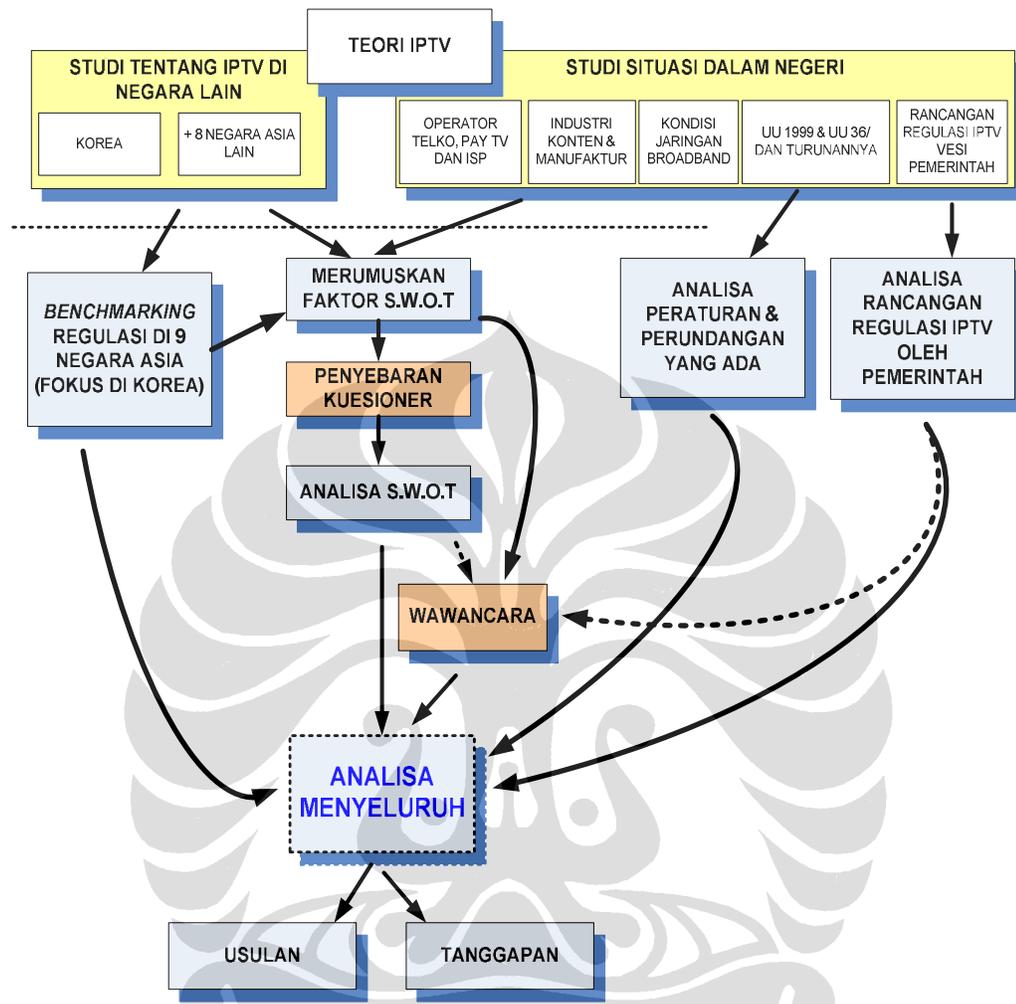
1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan survey melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai macam referensi dan hasil penelitian peneliti lain.

1.5.3 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan pada tahap pertama, selain dengan melakukan *benchmarking* terhadap regulasi di negara-negara lain, juga dengan melakukan analisa **kuantitatif** terhadap hasil survey. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa SWOT. Dengan analisa ini dapat disimpulkan strategi apa yang seharusnya dilakukan dalam implementasi layanan IPTV di Indonesia. Sedangkan pada tahap kedua dilakukan secara **kualitatif**. Dengan teknik ini didapatkan kategori-kategori yang sering muncul dan menjadi perhatian dan dapat dijadikan butir-butir usulan regulasi. Penulis juga melakukan analisa terhadap Peraturan-perundangan yang ada untuk mengetahui pada bagian mana dari Peraturan-perundangan tersebut yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan layanan IPTV di Indonesia.

1.6 KERANGKA PENELITIAN



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Kajian ini berangkat dengan landasan teori mengenai IPTV, kajian dilakukan mulai dari definisi, kemudian mengarah pada segi teknis dan bisnisnya. Dilanjutkan dengan kajian mengenai kondisi eksisting di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi layanan IPTV, yaitu :

- Industri telekomunikasi dan jaringan yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi baik jaringan tulang-punggung dan jaringan aksesnya
- Industri televisi berbayar dan perkembangannya
- Industri konten dan manufaktur

- Minat masyarakat terhadap layanan IPTV yang diambil dari hasil penelitian peneliti lain..

Langkah berikutnya adalah kajian terhadap penyelenggaraan layanan IPTV di sembilan (9) negara Asia. Negara-negara tersebut adalah Korea Selatan, Hongkong, Jepang, Thailand, Singapore, China, Malaysia, India dan Taiwan. Namun kajian secara mendalam hanya kepada satu negara yaitu Korea Selatan.

Dari analisa terhadap kondisi yang ada baik kondisi di dalam negeri dan di luar negeri, penulis menyusun faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi terselenggaranya layanan IPTV di Indonesia.

Untuk mengetahui strategi apa yang seharusnya dilakukan dalam implementasi layanan IPTV, penulis melakukan survey kepada masyarakat yang bekerja pada sektor telekomunikasi dan penyiaran, yaitu penyelenggara telekomunikasi, lembaga penyiaran, badan regulator dan pemerintah. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar keempat faktor-faktor tersebut. Hasil survey dianalisa menggunakan analisa SWOT.

Selanjutnya dilakukan kajian terhadap Undang-undang yang ada, terutama UU (Undang-undang) Telekomunikasi dan UU Penyiaran, untuk mengetahui pasal-pasal mana dari kedua UU tersebut yang mendukung dan yang tidak mendukung terselenggaranya layanan IPTV di Indonesia. Kajian juga dilakukan terhadap rancangan regulasi IPTV yang diusulkan pemerintah (juni 2009) untuk mengetahui sejauh-mana rancangan itu dapat diimplementasikan dan dampak baik-buruknya.

Untuk memperkuat analisa, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang kompeten dalam penyelenggaraan layanan IPTV, yaitu yang berasal dari regulator (BRTI, KPI), pemerintah dan juga dari operator.

Dan langkah terakhir adalah melakukan analisa secara keseluruhan, untuk merumuskan beberapa alternatif model lisensi dan regulasi yang cocok diterapkan di Indonesia, juga tanggapan terhadap rancangan regulasi IPTV yang telah diusulkan oleh pemerintah baru-baru ini. .

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB 1** **PENDAHULUAN**
Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB 2** **TEORI IPTV**
Berisi teori mengenai IPTV, ditinjau dari sisi Teknis dan Bisnis.
- BAB 3** **KONDISI YANG ADA**
Berisi pembahasan tentang serta kondisi di dalam negeri yang berkaitan dengan penyelenggaraan IPTV. Diantaranya adalah kesiapan infrastruktur jaringan, perkembangan industri telekomunikasi dan penyiaran dalam negeri, serta regulasi yang ada. Juga paparan mengenai rancangan regulasi IPTV yang telah diusulkan oleh pemerintah. Paparan mengenai penyelenggaraan layanan IPTV di sembilan (9) negara-negara Asia juga termasuk dalam Bab ini.
- BAB 4** **PENGUMPULAN DATA DAN ANALISA**
Berisi tentang hasil pengumpulan data dan analisisnya. Analisa menggunakan teknik *benchmarking*, SWOT dan Kualitatif.
- BAB 5** **INTISARI HASIL KAJIAN DAN USULAN REGULASI**
Merupakan intisari hasil kajian dan merumuskannya sebagai usulan terhadap regulasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia dan strategi penerapannya.
- BAB 6** **KESIMPULAN**
Merupakan bab petutup tesis ini yang berisi kesimpulan dari penelitian